

**PENERAPAN KEPROTOKOLAN DALAM PENYELENGGARAAN  
BERBAGAI KEGIATAN/ACARA  
DI KANTOR PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK  
(ACARA PERINGATAN HUT KOTA DEPOK KE 10)**

*Ni Made Widhi Sugianingsih, S.E. & Narulita Syarweni, S.E, ME.*

*Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta  
Kampus UI Depok 16425*

**ABSTRAK**

*Teh arrangement of program is very important on one event. The protocolir activity is needed to make the event could run possibly. The settlement of program should be arranged well and properly on the standard rule. It is stated to give the guarantee that every programs or step will be done and there is no hesitation it will be out of the rule eventhough the actor or the people involved changed. The standard protocolair must be available in every lacial district provinces. Based the investigation on this research, Depok as the district government does not have the standard rule of ptotocolair. It is not good. The government should make the standard rule of one event or occasion. The settlement of rules should br flexible, not ststic and give the freedom to the people to change the situation based on the need and neccessity.*

*Key word : protocolair, arrangement, rules, flexible, standard and the event or ceremony*

**PENDAHULUAN**

Keprotokolannya menjadi penting di dalam berbagai *event*, terutama karena menyangkut kehormatan dan penghargaan pada setiap pelaku baik individu maupun entitas yang terlibat di dalam suatu kegiatan resmi tertentu. Aturan-aturan keprotokolannya diterapkan guna menjamin bahwa para pelaku yang terlibat di dalam suatu kegiatan/acara resmi tersebut mendapatkan penghormatan dan penghargaan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat masing-masing. Aturan keprotokolannya diterapkan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman atau kesalahpenguasaan yang dapat mengarah pada situasi-situasi yang kurang bersahabat, misalnya ketersinggungan dan ketidakterimaan pihak-pihak yang terlibat. Tidak kalah pentingnya adalah untuk meningkatkan hubungan baik dan kerjasama. Aturan-aturan keprotokolannya itu sendiri pada dasarnya merupakan rangkaian aturan yang dibuat dan disepakati dengan tujuan menertibkan setiap peristiwa/acara yang melibatkan satu atau lebih pihak agar berjalan lancar, tertib dan sesuai tata cara. Sangat dimungkinkan di setiap negara/daerah memiliki aturan atau pedoman protokol sendiri. Demikian pula di tingkat Nasional, Pemerintah Daerah dan Lembaga-lembaga swasta lainnya. Seperti halnya dengan Kantor Pemerintah Daerah Kota Depok yang sering dan rutin menyelenggarakan acara-acara tentunya ada aturan-aturan keprotokolannya yang diterapkan disesuaikan dengan kondisi setempat. Namun petugas dan pejabat protokol harus pula senantiasa peka akan tradisi/kebiasaan yang khusus dari suatu unit masyarakat tertentu yang mungkin tidak terlalu bertentangan dengan standar keprotokolannya dan masih dapat diakomodasi pemberlakuannya di dalam suatu event, atau acara. Aturan-aturan keprotokolannya yang dibuat hendaknya tidak kaku, mengandung unsur

fleksibilitas dan kemampuan penyesuaian pada situasi-situasi sulit tertentu, demi tetap terpeliharanya suasana bersahabat antara pihak-pihak yang diatur. Karena itu seharusnya aturan-aturan tentang kegiatan protokol dalam melaksanakan suatu kegiatan atau acara dituangkan dan dirangkum dalam suatu Buku Pedoman yang di dalamnya meliputi tentang aturan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan. Dengan adanya Buku Pedoman dapat menjadi rujukan setiap kegiatan/acara bagi petugas pelaksana, juga bagi pihak-pihak yang terkait.

Kata Kunci: aturan keprotokolanan, tata tempat, tata upacara, tata penghormatan

## **LATAR BELAKANG**

Salah satu ciri era globalisasi dewasa ini adalah adanya keterikatan dan ketergantungan antar bangsa di dunia yang semakin terasa intensitasnya. Hal ini berlangsung tidak hanya pada tingkat resmi seperti negara dan lembaga-lembaga resmi lainnya, namun juga pada tingkat yang tidak resmi yaitu unit-unit swasta serta lembaga-lembaga non pemerintah di dalam masyarakat. Dimana semakin tinggi intensitas hubungan tersebut dengan sendirinya juga berdampak pada peningkatan frekuensi interaksi di antara unit-unit masyarakat tersebut, baik secara perorangan maupun kelembagaan. Di dalam prakteknya setiap interaksi diselenggarakan berdasarkan suatu keterikatan pada tata cara interaksi yang mengacu pada tata krama pergaulan dan kepantasan di dalam berinteraksi. Perangkat aturan yang sejak lama dan hingga kini dipergunakan dikenal sebagai keprotokolanan.

Aturan-aturan keprotokolanan itu sendiri pada dasarnya merupakan rangkaian aturan yang dibuat dan disepakati dengan tujuan menertibkan setiap peristiwa/acara yang melibatkan satu atau lebih pihak agar berjalan lancar, tertib dan sesuai tata cara. Pada tingkat Nasional (domestik), selama ini berbagai pola hubungan dalam berbagai acara dan peristiwa resmi diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1987 mengenai Protokol. Keprotokolanan pada tingkatan Internasional, Nasional ataupun lokal mengacu pada prinsip kelancaran, ketertiban, dan tata cara di dalam pelaksanaan berbagai kegiatan yang bersifat resmi yang pelakunya bisa berasal dari elemen masyarakat yang luas, resmi maupun tidak resmi.

Pada dasarnya memang keprotokolanan amatlah terfokus pada penghormatan dan penghargaan, baik kepada perorangan, lembaga, ataupun simbol-simbol yang melekat pada perorangan dan lembaga tersebut. Dengan penerapan keprotokolanan yang benar, diharapkan bahwa tidak akan terjadi kesalahpahaman atau kesalahpengertian yang dapat mengarah pada situasi-situasi yang kurang bersahabat, ketersinggungan dan ketidakterimaan pihak-pihak yang terlibat, yang justru akan sangat berlawanan dengan cita-cita awal yaitu meningkatkan hubungan baik dan kerjasama.

## **TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara langsung bagaimana penerapan aturan-aturan keprotokolanan yang dibuat dan disepakati dalam pelaksanaan kegiatan atau acara di Kantor Pemerintah Daerah Kota Depok. Dalam penelitian ini mengambil contoh acara pelaksanaan peringatan HUT ke 10 Kota Depok yang diselenggarakan pada tanggal 27 April 2009. Merupakan momen yang baik sekali untuk dapat mengetahui bagaimana persiapan yang dilakukan, pelaksanaannya dan evaluasinya.

## **METODE PENELITIAN**

Untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas serta agar dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka kami mengumpulkan data-data yang diperlukan yang bersifat kualitatif kemudian dianalisa secara deskriptif. Adapun data-datanya diperoleh dengan cara:

- a. Wawancara, dimana penulis bertanya langsung kepada Kasubag Humas dan Protokol beserta para stafnya tentang aturan-aturan keprotokolan yang diterapkan dan tugas-tugas dari bagian Humas dan Protokol dalam pelaksanaan suatu acara.
- b. Observasi, yaitu dimana penulis secara langsung akan melihat persiapan pelaksanaan suatu acara, kemudian turut hadir melihat langsung pelaksanaan acaranya.
- c. Dokumentasi yaitu penulis akan meliput acara yang sedang berlangsung kemudian mendokumentasikan dalam bentuk foto-foto dan bentuk visual.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Adapun rangkaian acara peringatan HUT Kota Depok yang ke 10 selengkapnya yaitu:

1. Jalan sehat yang bekerjasama dengan Radio Republik Indonesia Depok yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 19 April 2009.
2. Ziarah ke Makam Pahlawan Kalimulya Depok yang dilaksanakan pada hari Jumat pagi tanggal 24 April 2009 sedangkan sore harinya diadakan Tasyakuran di Masjid yang ada di lingkungan kantor PEMDA Depok bersamaan dengan diadakannya lomba Tumpeng yang diikuti oleh seluruh kelurahan se kota Depok.
3. Pelaksanaan acara gladi bersih pada hari Sabtu tanggal 25 April 2009
4. Acara Puncak Peringatan HUT Kota Depok Ke 10 pada hari Senin tanggal 27 April 2009, bersamaan dengan peringatan Hari Otonomi Daerah dengan melaksanakan upacara di lapangan upacara.

Dalam penelitian ini kami mengambil satu contoh acara yang saat itu bertepatan waktunya dilaksanakan peringatan HUT Kota Depok ke 10 dan juga peringatan hari otonomi daerah. Materi yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah penerapan pengaturan protokol pada acara peringatan HUT Kota Depok ke 10 yang meliputi Tata Upacara, Tata Tempat dan Tata Penghormatan.

### **1. Tata Upacara**

Upacara HUT ke 10 kota Depok yang dilaksanakan tersebut termasuk jenis upacara yang diadakan di luar ruangan atau di lapangan. Untuk kelancaran pelaksanaan upacara tersebut maka dibuat aturan-aturan yang disepakati pada saat pertemuan untuk briefing antara bagian Humas dan Protokol dengan bagian yang terkait yaitu bagian Sosial.

Beberapa aturan tersebut meliputi beberapa hal seperti:

- a. Komponen yang terlibat dalam upacara yaitu: inspektur upacara, komandan upacara, penanggung jawab upacara, petugas upacara (pembawa acara, pembawa Pataka, pembaca teks, Korp Musik), peserta upacara (diantaranya turut juga pelajar, pramuka, paskibra).
- b. Perlengkapan upacara antara lain mimbar upacara, naskah/teks yang akan dibacakan, meja kursi dan lain-lain.
- c. Urutan acara dalam upacara mulai dari pembukaan, acara pokok dan penutup.

## 2. Tata Tempat

Pengaturan tata tempat pada saat acara berlangsung sudah diatur sedemikian rupa mengacu pada situasi dan kondisi tempat, sifat acara seerta kepatutan. Dalam hal ini karena acara dilaksanakan di lapangan maka seperti biasanya menggunakan tenda beserta kursi-kursi tempat undangan, panggung kecil untuk menyampaikan pidato dan peserta dan petugas berdiri di lapangan.

Tatat tempat untuk pejabat dan undangan lainnya disesuaikan berdasarkan aturan pada umumnya sesuai jabatan dan kedudukan serta aturan setempat. Penempatan undangan dapat dilihat pada gambar-gambar hasil liputan dan juga lay out upacara.

## 3. Tata Penghormatan

Tata penghormatan meliputi tata cara memberi hormat dan penyediaan kelengkapan sarana yang diperlukan untuk kelancaran upacara.

- Penghormatan pertama dilakukan kepada inspektur upacara yaitu Bapak Walikota. Dimana pada saat penghormatan berlangsung diiringi oleh musik dari Korp Musik Gita Praja Depok dan penghormatan pasukan.
- Penghormatan kepada lagu kebangsaan dengan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indoneia Raya juga diiringi oleh korp musik.
- Penghormatan kepada PATAKA PARICARA DHARMA yaitu yang dilakukan oleh 9 orang dari satuan polisi pamong praja kota Depok dengan membawa bendera dan simbul-simbul kota Depok.
- Bendera Merah Putih sudah dikibarkan pada tiang bendera sebelumnya upacara dimulai sebagai bentuk penghormatan.
- Sebagai bentuk penghormatan lainnya adalah pembacaan Panca Prasetya Korpri, pembacaan Pancasila dan pembacaan UUD 1945.

## DAFTAR PUSTAKA

Aryati Lies.

2004 *Panduan Untuk Menjadi MC Profesional*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler.

2005 *Pedoman Protokol Negara, Jakarta*. Jakarta: Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.

Indra Kesuma Rizali.

2006 *Etika Keprotokan dalam MICE*. Depok: TOT MICE.

Sugiyono.

2007 *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: ALFABETA.

Valerie Grant – Sokolosky.

1991 *Protokol Perusahaan*. Solo: PT Dabara Bengawan.

